

EDISI : Selasa, 23 April 2019

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



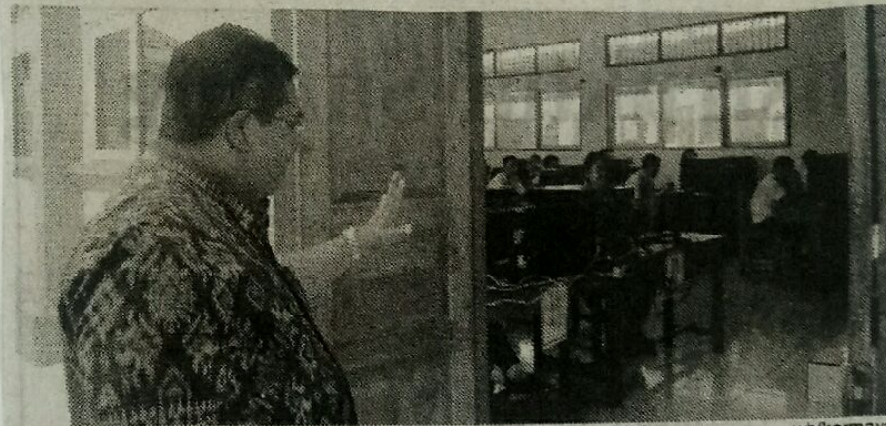
PENYUSUN :  
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN BULELENG

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Media : *WARITA BALI*

Kategori : *Peperangan*

## Bupati Buleleng Pantau UNBK SMP



wb/karmaya

**UNBK SMP:** Bupati Buleleng Agus Suradnyana, saat memantau UNBK tingkat SMP di SMAN 1 Seririt, Senin (22/4).

**BULELENG** - Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP tahun 2019 yang dimulai Senin (22/4), mendapat perhatian khusus Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Tidak hanya memenuhi sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan, Bupati Suradnyana juga memantau langsung kegiatan UNBK yang diikuti 6.025 peserta dan UNKP yang diikuti 5.528 peserta. "Saya lihat tadi di SMPN 1 Seririt, tidak ada yang absen, semuanya hadir dan tertib saat pelaksanaan ujian," tandas Bupati Suradnyana, disela-sela pemantauan UNBK tingkat SMP di SMA Negeri 1 Seririt.

Selain mengapresiasi kehadiran peserta dan pelaksanaan ujian yang kondusif, Bupati Suradnyana juga berharap pelaksanaan UNBK di Kabupaten Buleleng bisa berjalan lancar hingga berakhir tanggal 30 April mendatang. "Saya berharap UNBK diseluruh SMP se-Kabupaten Buleleng bisa berjalan dengan lancar sampai selesai dan siswa siswi agar tetap menjaga kesehatan selama UNBK berlangsung," ujar Suradnyana seraya menandaskan Pemkab Buleleng melalui Disdikpora berupaya menambah perangkat komputer untuk melengkapi sarana prasarana UNBK.

Sementara Sekretaris Disdikpora Buleleng, Made Astika memaparkan ujian dibedakan menjadi dua katagori yakni Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). "Dari hasil pemantauan, UNBK hari pertama tidak ada gangguan, lancar karena jaringan internet dan listrik cukup lancar," ungkapnya. (kar,ger)

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : **WARTA BALI**

Kategori : **LKPJ**

## Bahas LKPJ 2018, Komisi Dewan Pertanyakan BKK



**LKPJ BUPATI:** Rapat pembahasan LKPJ Bupati Buleleng tahun 2018, draf rekomendasi dewan.

**BULELENG** - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buleleng Tahun 2018 oleh wakil rakyat di DPRD Buleleng sudah hampir rampung. Dari rapat gabungan komisi dengan agenda penyusunan rancangan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tahun 2018, ada sejumlah catatan yang menjadi bahan rekomendasi.

Selain penyempurnaan nomenklatur penyusunan LKPJ dan regulasi pelayanan JKN-KIS, pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Wirjana tersebut, dua komisi yakni Komisi I, II dan III juga mempertanyakan BKK Badung sekaligus mengusulkan agar penyaluran BKK maupun Bansos dilakukan sesuai dengan aturan dan memperhatikan etika.

Penyampaian bahan rekomendasi dewan terhadap LKPJ Bupati Tahun 2018, diawali Komisi I yang langsung disampaikan ketuanya, Putu Mangku Mertayasa. Selain pelibatan dewan dalam pelaksanaan mutasi pejabat oleh Baperjakat, komisi yang membidangi pemerintahan, politik dan hukum ini juga mengusulkan agar dilakukan kajian lebih mendalam serta perbaikan regulasi penyaluran BKK, Hibah, dan Bansos. "Perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan regulasi penyaluran Hibah dan Bansos kepada warga masyarakat, terutama BKK Kabupaten Badung berupa program bedah rumah. Karena banyak warga masyarakat yang bertanya apa kriteria dan bagaimana regulasinya?" tandas Mertayasa.

Agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, kata Mertayasa, dewan dipandang perlu untuk mengingat-

kan eksekutif untuk melakukan kajian terhadap penyaluran BKK terlebih dari kabupaten lain sehingga tidak melanggar ketentuan dan juga etika pemerintahan. "Verifikasi penerima bantuan BKK Badung kepada 450 warga kurang mampu di Buleleng juga harus dilakukan transparan, sehingga tidak justru menimbulkan keresahan di masyarakat," tandasnya. Usulan rekomendasi terkait penyempurnaan regulasi penyaluran BKK, Hibah dan Bansos dari Komisi I, mendapat dukungan dari vokalis dewan Putu Mangku Budiasa dari Komisi II dan Putu Tirta Adnyana dari Komisi III.

Rekomendasi dewan terkait penyempurnaan regulasi penyaluran BKK, Hibah dan Bansos diperlukan karena dalam LKPJ Bupati Tahun 2018, BKK Kabupaten Badung berupa bedah rumah dengan total nilai Rp 22,5 miliar, berubah menjadi Hibah Bansos.

Sesuai tupoksinya, Komisi II disampaikan Ketuanya Putu Mangku Budiasa mengusulkan rekomendasi terkait perbaikan kinerja DPUPR dan Disperkimta karena dinilai gagal dalam melaksanakan kegiatan antara lain RTH Bung Karno dan Jembatan Tukad Batu Pulu. Komisi III disampaikan anggotanya, Putu Tirta Adnyana merekomendasikan perbaikan kinerja terkait capaian PAD yang belum mencapai target. Sementara Komisi IV disampaikan langsung ketuanya, Gede Wisnaya Wisna merekomendasikan agar dilakukan perbaikan pelayanan kesehatan terhadap peserta JKN oleh RS dan regulasi serta update data warga. (kar,dha)

Nama Media :

NARITA BALI

Kategori :

MONEY POLITICS

# Lagi, Somvir Dilaporkan ke Bawaslu Buleleng

**Calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi Bali Dapil Buleleng, Dr. Somvir diterjang isu money politics. Setelah warga masyarakat dari Kelurahan Kampung Anyar dan Kaliuntu Kecamatan Buleleng, Senin (22/4) caleg Partai Nasdem ini kembali disebut-sebut memberi uang kepada oknum warga masyarakat untuk meraup suara pada Pemilu 2019.**

**BULELENG** - Sesuai laporan yang disampaikan Nyoman Redana (55) beralamat Banjar Dinas Munduk Uaban Desa Pedawa Kecamatan Banjar, Somvir memberinya uang sebanyak Rp5 juta untuk mendapat suara pada Pemilu 2019 di wilayah Desa Pedawa Kecamatan Banjar.

Dikonfirmasi usai melapor di Sekretariat Bawaslu Buleleng, Senin (22/4), Redana mengungkapkan, laporan tentang money politics ini dilakukan karena mendapatkan teror via telepon. "Setelah pencoblosan, ada orang tidak

dikenal menelepon saya. Nomorinya tidak kelihatan, dia bilang hati-hati karena tidak dapat suara di Desa Pedawa," jelasnya.

Karena takut, Redana mengaku langsung memutuskan untuk melapor dan menyerahkan sisa dana sebanyak Rp500 ribu ke Bawaslu Buleleng. "Saya serahkan Rp500 ribu karena Rp1 juta sudah saya bagikan kepada 10 orang lengkap dengan kartu nama caleg, dan Rp3,5 juta lainnya sudah habis dibelanjakan," terangnya.

Selain menyerahkan uang

Rp500 ribu dan kartu caleg, kata Redana, pihaknya juga mengajak Gede Muliasta sebagai saksi dari laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Buleleng. "Saya ajak saksi, yang menandatangani kwitansi penerimaan uang dari Subrata sebanyak Rp5 juta, tanggal 15 April 2019. Uangnya untuk mencari suara caleg (Somvir, red) di Desa Pedawa Kecamatan Banjar," tandasnya.

Redana berharap, dengan laporan dan penyerahan sisa uang sebanyak Rp500 ribu serta kartu nama caleg Som-

vir dapat membuatnya tenang, dan pihak Bawaslu memproses dugaan politik uang yang dilakukan oknum caleg pada Pemilu 2019 ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng Putu Sugi Ardana membenarkan adanya laporan warga masyarakat tentang dugaan terjadinya money politics tersebut. "Jadi benar, pada hari ini ada warga masyarakat dari Desa Pedawa Kecamatan Banjar yang melaporkan dugaan money

politics oleh oknum caleg DPRD Provinsi Bali, Dapil V Buleleng," jelasnya. Disamping menerima laporan, Bawaslu menerima titipan uang sebanyak Rp500 ribu dan sejumlah kartu nama caleg, sebagai alat bukti laporan. "Selanjutnya, kita minta klarifikasi dari pelapor dan juga saksi yang menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp5 juta dari saudara Subrata," tandas Sugi seraya menyebutkan laporan akan dikaji bersama Tim Gakkumdu sebelum ditangani lebih lanjut. (kar,tra)